

**ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI KONSUMEN**

**(Studi Terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun
2017)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Maryati

NPM : 1421030260

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN

(Studi Terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017)

Oleh:

Maryati

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan syarat tidak merugikan orang lain, dan menjalankan perekonomian tersebut sesuai dengan syari'at Islam serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan hidup masyarakat. Di dunia perekonomian ada yang dikenal dengan jual beli, dalam jual beli Nabi menghimbau kepada umat nya agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen, pemerintah telah menetapkan harga-harga bahan pokok sesuai dengan komoditinya. Penetapan harga atau *tas'ir* merupakan intervensi pemerintah dalam menetapkan suatu harga komoditi barang yang ada di pasar. Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Hasil penelitian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, adalah berdasarkan pendapat para ulama penetapan harga (*tas'ir*) bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qura'an dan Hadis, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual-beli

dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga jika tidak ada kezaliman dalam suatu pasar, karena harga akan terbentuk dengan sendirinya dalam pasar tersebut. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya, dan menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame / Bandar Lampung Telp. 0721 703260



PERSETUJUAN

Nama : Maryati
 NPM : 1421030260
 Jurusan : Muamalah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri
 Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
 Penetapan Harga Acuan Pembelin di Petani dan Harga
 Acuan Penjualan di Konsumen.

MENYETUJUI


Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
 munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A. **Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**
 NIP. 196603301992031002 NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan Muamalah,



Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
 NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen” (Studi Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017), disusun oleh Nama: Maryati, NPM: 1421030260, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Senin, 7 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. (...)

Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. (...)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (...)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (...)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

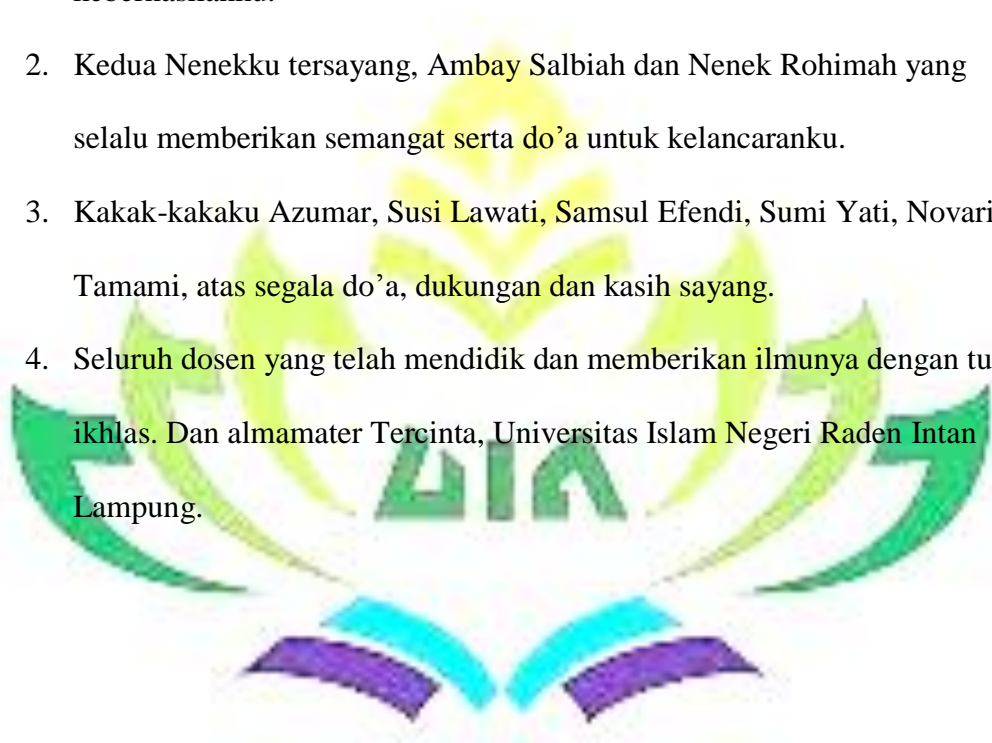
(Q.S. An-Nahl (16) : 90)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta dan kasihnya yang telah memberikan kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Alm. Ayahandaku tercinta Mansur, dan Mamaku tercinta Zubaidah, atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa yang tidak henti-henti untuk keberhasilanku.
2. Kedua Nenekku tersayang, Ambay Salbiah dan Nenek Rohimah yang selalu memberikan semangat serta do'a untuk kelancaranku.
3. Kakak-kakaku Azumar, Susi Lawati, Samsul Efendi, Sumi Yati, Novarida, Tamami, atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
4. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

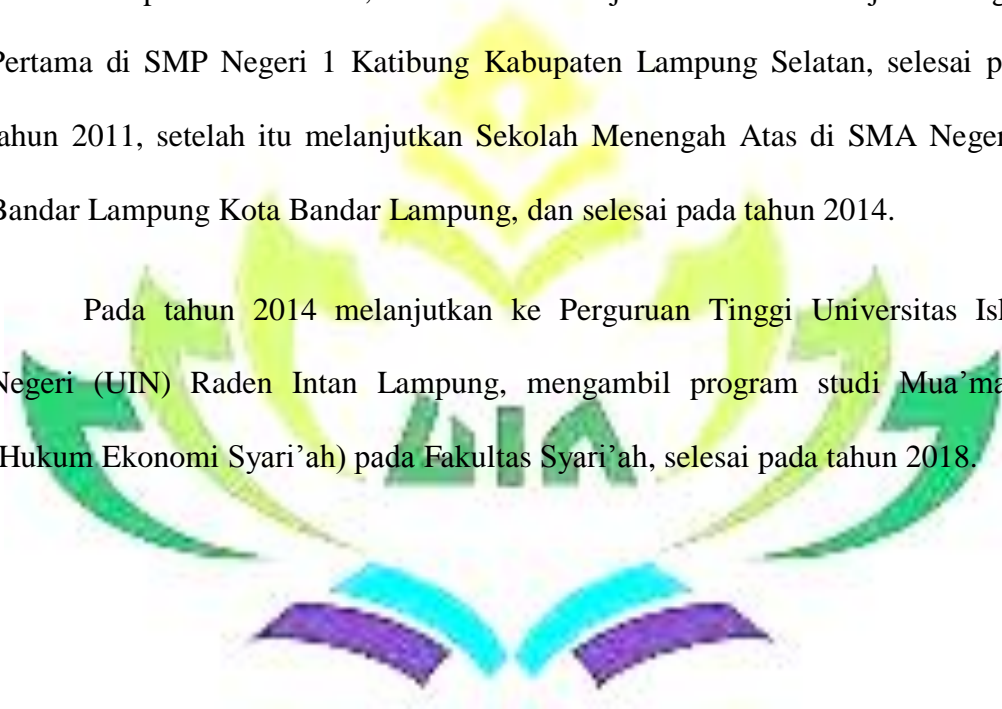


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Maryati, anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Mansur dan Ibu Zubaidah. Lahir di Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 15 Februari 1996.

Mempunyai riwayat pendidikan formal yang diawali dengan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Babatan Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2009, setelah itu melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah, selesai pada tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelia di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen” (Studi Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017), dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku ketua jurusan mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku sekretaris jurusan mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung;

3. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing dan member arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Team penguji munaqosah skripsi: Drs. H. Khoirul Abror, M.H. Sebagai ketua, Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. Sebagai sekretaris, Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Sebagai penguji I, Dr. Iskandar Syukur, M.A. Sebagai penguji II;
5. Bapak atau Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain nya;
7. Sahabat-sahabatku, Resa Wulandari, Nurika Laila, S.H., Windiyan Ngesti, S.H., Fitri Afifah, Dewi Aniroh, Munawaroh, dan masih banyak lagi yang lain, serta teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Kalian adalah semangatku, semoga kita selalu menjadi sahabat dan saudara untuk selamanya, amin;
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2014, khususnya Mu'amalah C;
9. Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun dalam perbuatan;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT diserahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecil nyaskripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu bidang keislaman.

WassalamualaikumWr.Wb.

Bandar Lampung, 7 Mei 2018

Penulis

Maryati



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	Vii
PERSEMBAHAN	Vii
RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	Ix
DAFTAR ISI	X
	Xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan	10
F. Metode Penelitian	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Harga	15
1. Pengertian Harga	15
2. Penetapan Harga	19
3. Pandangan Para Ahli Tentang Penetapan Harga	24
B. Tanggung Jawab Negara Dalam Penentuan Harga	30
1. Penetapan Harga Pada Zaman Rasullallah SAW	30
2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga oleh Pemerintah	33
3. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Penjual dan Pembeli	35
C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penetapan Harga	44
1. Prinsip Keadilan	44
2. Prinsip <i>Ar-Ridha</i>	45
3. Prinsip Keterbukaan	46
4. Prinsip Kejujuran	46
 BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Latar Belakang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di	

Konsumen	47
B. Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017	54
C. Kelebihan dan Kelemahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017	66

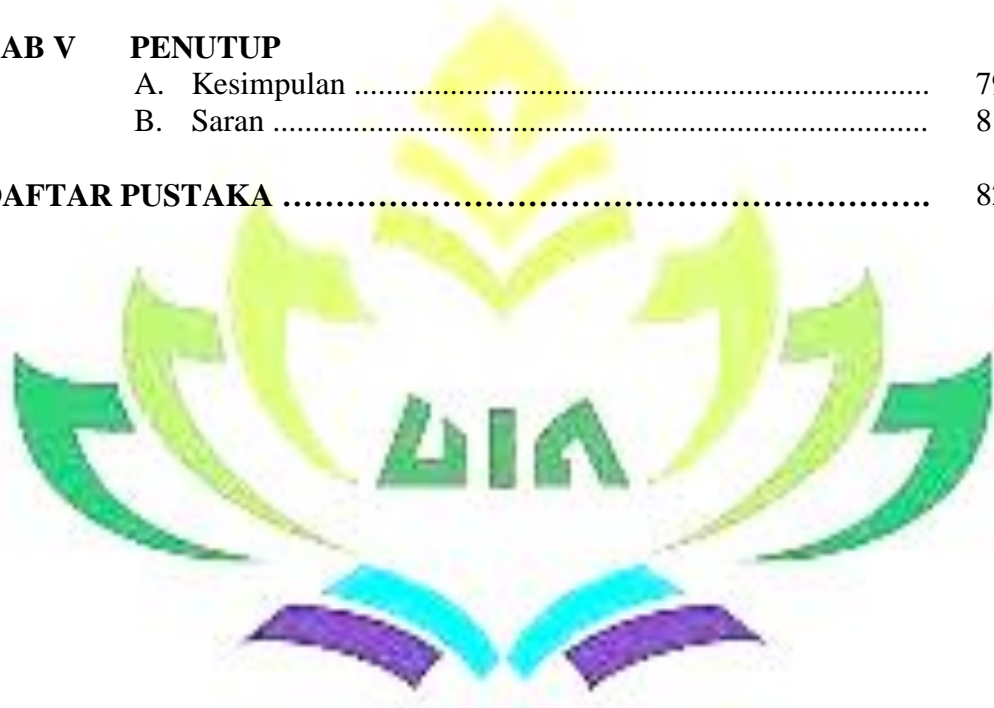
BAB IV ANALISIS DATA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN	69
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen”**(Studi Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017). Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).¹
- ❖ Hukum Islam adalah istilah kata di Indonesia, sebagai terjemahan dari bahasa Arab yaitu *Al-Fikih Al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut juga sebagai *Al-Syariah Al-Islamy*. Namun yang digunakan adalah kata syariah Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan fiqih. Fiqih secara terminologis adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 58.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, cet VII, Jakarta, 1995, h.10

- ❖ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 27/M-DAG/PER/5/2017 adalah peraturan Menteri untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen³

Jadi dengan demikian, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi Penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah serta tersedianya

³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

literature yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh hartakekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengancara bekerja.Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau berbisnis.Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan olehmanusia adalah kegiatan berdagang atau jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) :275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.47

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Menurut Hendi Suhendi inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan kesepakatan.⁶ Untuk lebih jelasnya benda yang dimaksud adalah barang dan uang, yang sifatnya mempunyai nilai tukar, yakni benda-benda yang mempunyai nilai harga dan dapat dibenarkan menurut syara'. Dalam perjanjian jual beli ada dua subyek yang terkait, yaitu pihak satu (penjual) yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sehingga timbul hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian jual beli.

Menurut Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Muamalah, berpendapat bahwa hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h.69

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
2. Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat dalam kehidupan masyarakat.⁷

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia perdagangan atau jual beli yang semakin berkembang tentunya si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qobul* dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *garar*, ataupun *riba*. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penetapan harga (*tas'ir*), menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambahkan atau

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.15

mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁸ Dan Ibn Taimiyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran seperti yang dikemukakan bahwa *tas'ir* ialah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga pasar. Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar.⁹

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam AL-Qur'an dan Hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya.

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hanbali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.¹⁰

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.380

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, h.383

Dalam suatu hadits yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ, فَسَعَّرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).

Artinya: Dari Anas bin Malik ra dia berkata: “Pada masa Rasulullah SAW harga-harga di Madinah pernah melonjak. Lalu orang-orang berkata:”Wahai Rasulullah harga-harga melonjak tinggi, maka tentukanlah harga untukku”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah al-Musa’ir (yang menentukan harga), al-Qaabidh (Yang menahan), al-Baasith (Yang melapangkan), ar-Raaziq (Yang member rizki). Sesungguhnya aku mengharapkan berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezhaliman baik mengenai jiwa dan tidak pula harta”. (Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).¹¹

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga Rasulullah Saw. Meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak Rasulullah Saw. Juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.¹²

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.

Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil.

¹¹ Al Hafidh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.398-399

¹² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.160

Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam arangka keadilan.¹³

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dijelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan suatu harga acuan untuk pembelian di petani dan untuk penjualan di konsumen, harga acuan pembelian di petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain. Harga acuan penjualan di konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan struktur

¹³ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.107

biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.¹⁴

Pelaku usaha dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengacu pada harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh menteri.¹⁵ Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di petani dan harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di konsumen, menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di petani dan melakukan penjualan sesuai dengan harga acuan penjualan di konsumen sebagai dimaksud dalam pasal 5.¹⁶

Dalam peraturan tersebut sangat jelas bahwa menteri perdagangan menetapkan harga acuan pembelian di pihak petani dan harga acuan penjualan di konsumen, yang artinya hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya penetapan harga oleh pemerintah. Karena dengan adanya penetapan harga berarti membatasi hak kepemilikan dari seseorang, dalam artian pihak petani mau tidak mau mereka harus menjual hasil panen mereka sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini melanggar hak kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Oleh karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

¹⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

tanpa adanya paksaan. Dengan adanya penetapan harga tersebut tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 27 tahun 2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di consume

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 27 tahun 2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain, adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan muamalah, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penetapan harga yang jelas dalam jual beli.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris dengan harapan dapat bermanfaat dalam mekanisme penetapan harga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja untuk lebih memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini dengan cara membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 27

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h.6.

¹⁸ Choilid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan 12, 2012), h.44.

Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen

3. Data dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisis pokok permasalahan.¹⁹ Bahan hukum primer yang Penulis pergunakan adalah Peraturan Menteri Perdagangan, Al-Qur'an, Hadits, Pendapat para ulama, dan buku-buku Hukum Ekonomi Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari buku-buku penunjang seperti ensiklopedia Islam dan kamus.

4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

¹⁹Susisadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), h.65.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik sumber al-Qur'an dan Hadis, atau buku-buku literature lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah untuk dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁰

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis*. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²¹ Selanjutnya setelah data diperoleh, dianalisis secara deskriptif analisis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode induktif yaitu dengan cara menjelaskan dalil-dalil khusus atau teori-teori sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam meneliti masalah ini, metode ini dipakai untuk menganalisa Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen kemudian

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263

ditarik pada suatu kesimpulan dengan menggunakan data-data mengenai hukum Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Harga

1. Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur baruan pemasaran yang paling mudah disesuaikan, cirri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²²

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.²³

²² H.M. Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2007), h. 87

²³ *Ibid.*,

Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.²⁴

Menurut Rachmat Syafei, harga yang terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/ jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.²⁵

Harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diat

²⁴*Ibid*, h.88

²⁵*Ibid*, h.99

(denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.²⁶

Istilah-istilah di atas sudah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terma tentang harga, yaitu: *'iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price/* harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep harga di mana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan.²⁷

Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan pemerintah dan penawaran pasar.²⁸

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perseptif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 107-109

kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat *me-recovery* atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.²⁹

Apabila harga yang terbentuk tidak dapat *me-recovery* biaya produksi, atau presentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negative bagi penjual dan produsen. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat: “Apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat prosentase keuntungan tertentu, hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia.” (Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah*).³⁰

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual

²⁹ Ikhwani Abidin Basri., *Ekonomi Islam*, Cet-1, (Jakarta: Zikrul Hasan, 2004), h.88

³⁰ *Ibid.*,

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.³¹

2. Penetapan Harga

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman* karena *as-si'r* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.³²

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku Rozalinda yang berjudul *Fikih Ekonomi Syariah*:

اَلتَّسْعِيرُ هُوَ اَنْ يَّأْتِيَ مُرُ السُّاطَانَ اَوْ نَوَابِهِ اَوْ كُلِّ مِنْ وَّلِيِّ مِّنْ اُمُورِ الْمُسْلِمِينَ اَمْرًا اَهْلَ السُّوقِ اَلَا يُبَيِّعُوا
السَّلْعَ اِلَّا بِسَعَرٍ كَدَّ اَفِيْمَعُوْا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَيَّ لَا يُعْلُوْا اَلْاَسْغَارِ اَوْ النُّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا
يُضَارِبُوْا غَيْرِهِمْ, اَيَّ عَيِّنَعُوْنَ مِنَ الزِّيَادَةِ اَوِ النُّقْصَانِ عَنِ السَّعْرِ لِمُصْلِحَةِ النَّاسِ

"Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat".³³

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.332

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif), h.96

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 379

Penjelasan Sayyid Sabiq tentang ta'sir juga dijelaskan dalam buku Rozalinda yang berjudul *Fikih Ekonomi Syariah*, bahwa tas'ir berarti:

التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعَ شَمَنْ مَحْدُودٍ لِلسَّلْعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يُظْلَمُ الْمَلِكُ وَلَا يَرْهَوُ الْمُشْتَرِي

“Al-Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli”.³⁴

Ibn Taimiyyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga dengan pasaran. Seperti yang dikemukakan di bawah ini: “Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar). Hakikat tas'ir adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar”.³⁵

Fathi ad-Duraini guru besar Fikih Universitas Damaskus seperti yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas'iral-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.³⁶

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*,

itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan para pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian *tas'ir*, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, Negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.³⁷

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang mematok harga. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa

³⁷*Ibid.*,

(pemerintah) harus ikut campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang, inilah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab.³⁸

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³⁹

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh keuntungan. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.⁴⁰

Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.⁴¹

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang

³⁸ Lukman Hakim., *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.169

³⁹ Ibid., h.173

⁴⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2012), h.173

⁴¹ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.100

diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.⁴²

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.⁴³

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan oleh pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁴⁴

3. Pandangan Para Ahli Tentang Penetapan Harga

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.360

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.216

Hanbali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.⁴⁵

Sayyid Sabiq juga menyatakan terlarang melakukan *tas'ir* berdasarkan ketentuan dais riwayat Anas ibn Malik. Menurutnya berdasarkan hadis tersebut para ulama menetapkan haram hukumnya melakukan *tas'ir* karena hal ini dikhawatirkan mendapatkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan transaksi terhadap hartanya. Para ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harag yang terjadi di zaman Rasulullah Saw itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah Saw tidak mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.⁴⁶

⁴⁵Rozalinda, Op.Cit, h.383

⁴⁶*Ibid*,.

Menurut Qardhawi semasa hidupnya, Rasulullah Saw di Madinah tidak pernah campur tangan dalam menetapkan harga barang-barang kebutuhan. Karena pada waktu itu tidak terdapat orang yang menggiling gandum dan membuat roti dengan menyewa peralatan penggilingan atau pembuat roti dengan menggunakan buruh sebagai orang yang mengerjakannya, juga tidak ada orang yang menjual tepung terigu. Mereka membeli biji gandum kemudian menggiling dan membuatnya menjadi roti di rumah masing-masing. Masyarakat tidak pernah menyimpan gandum dalam jumlah yang besar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka membeli secukupnya dari pedagang besar.⁴⁷

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman pematokan harga, dan pematokan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang terkecuali dengan harga sekian, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut).⁴⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Menurutnya, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli

⁴⁷ Isnaini Harahap, dkk., Op.Cit., h.111

⁴⁸ *Ibid.*,

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.⁴⁹

Imam al-Syaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga maslahat muslimin. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Adapun mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak diridhai adalah bertentangan dengan Q.S.al-Nisa' (4) : 29.⁵⁰

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat akan haramnya melakukan *tas'ir*, namun dengan kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pendapat ulama, Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *tas'ir* dalam keadaan harga melambung (*ghala'*). Ibn Taimiyah menguji pendapat imam-imam mazhab dan beberapa ahlin fiqh, menurutnya, kontroversi antara para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Qushoniah, "Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi". *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2014), h.90

itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, ada dua pendapat dalam hal ini. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz al-Akbari, Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat anantara para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.⁵¹

Asy-Syafi'iyah dan Hanabalah menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis:

لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْعُرَ عَلَى النَّاسِ بَلْ يُبَيِّعُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَ

“Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai”.

Selanjutnya golongan asy-Syafi'iyah menyatakan:

⁵¹ *Ibid.*,

يَحْزُمُ التَّسْعِيرُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ بِأَنْ يَأْمُرَ أَلُو إِلَى السَّوْقَةِ أَلَّا يُبَيِّعُوا أَمْتَعَتِهِمْ إِلَّا بِكَدِّ اللَّتَضْيِيقِ
عَلَى النَّاسِ فِي أَمْرِهِمْ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِلَا طَعْمَةٍ

”Tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja”.⁵²

Kedua pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi terhadap barang dagangan lainnya.⁵³

Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan imam melakukan *tas’ir* tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga. Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah* menjelaskan pendapat pengikut Hanifah tentang *at-tas’ir*:

لَا يَنْبَغِي لِلْسلْطَنِ أَنْ يَسْعِرَ عَلَى النَّاسِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرَرٍ الْعَامَّةِ

“Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum”⁵⁴

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Eva Willy, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 11 No. 2 (2013), h.24

⁵⁴ *Ibid.*,

Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan *at-tas'ir*, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat seperti ini.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau melakukannya.

Sejalan dengan ini Malikiah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal ini dibiarkan saja.⁵⁵

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Penentuan Harga

1. Penetapan Harga Pada Jaman Rasulullah SAW

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Rasulullah

⁵⁵ *Ibid.*, h.30

SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dengan kebanyakan sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah.⁵⁶

Muhammad adalah seorang pedagang professional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan *al-Amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.⁵⁷

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya “itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*‘iwad al-mithl*)”. Menurutny, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya suplai berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus

⁵⁶ M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1 (Maret 2015), h.22

⁵⁷ *Ibid.*,

penjual menimbun atau menyembunyikan suplai.⁵⁸

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

- 1). Bila dalam kasus pembebasan budak sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.⁵⁹
- 2). Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atas ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.⁶⁰

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya *Al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penetapan harga. Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan,

⁵⁸ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997}, h.115

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.⁶¹

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah, pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang, di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu, karean penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan? Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulative sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai *supplier* sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.⁶²

2. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Oleh Pemerintah

Boleh jadi sebageian orang beralasan bahwa Negara dalam Islam tidak boleh campur tangan dalam masalah ekonomi dengan memaksakan norma dan etika atau menghukum mereka bila melanggarnya (menyimpang). Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, h.229

أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).

Artinya: Dari Anas bin Malik ra dia berkata: ”Pada masa Rasulullah SAW harga-harga di Madinah pernah melonjak. Lalu orang-orang berkata”: “Wahai Rasulullah harga-harga melonjak tinggi, maka tentukanlah harga untukku”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah al-Musa’ir (yang menentukan harga), al-Qaabidh (Yang menahan), al-Baasith (Yang melapangkan), ar-Raaziq (Yang member rizki). Sesungguhnya aku mengharapkan berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezhaliman baik mengenai jiwa dan tidak pula harta”.⁶³ Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Nasa’i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* menyatakan bahwa tidak ada yang menjadikan hadits ini sebagai bukti tentang pasifnya pemerintah dalam Islam dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadits ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik kepada pembeli (dengan memaksakan harga terhadap penjual) atau berpihak kepada penjual (dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli). Menurut Nabi, sikap ini adalah suatu tindakan tercela sehingga beliau tidak mau melakukannya agar saat bertemu dengan Allah, beliau tidak membawa beban tuntutan itu.⁶⁴

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

⁶³ Al Hafidh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.398-399

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.256

Bersumber dari hadits dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin al Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa*" Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan melakukan intervensi harga antara lain karena;⁶⁵

- 1). Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
- 2). Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhtiar* atau *ghaban faa hisy*. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
- 3). Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

3. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Penjual dan Pembeli

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi

⁶⁵ Heri Sudarsono, *Op.cit.*, h.222

batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.⁶⁶

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁶⁷

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen dunia.

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai Negara kesejahteraan, karena undang-undang dasar 1945 di samping sebagai konstitusi

⁶⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), h. 2.

⁶⁷*Ibid.*,

politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide Negara kesejahteraan.⁶⁸

Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen. Namun jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Pandangan ini berpendapat bahwa ekonomi hanya berfungsi bila ada kerangka hukum yang melandasinya.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-undang perlindungan konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.

Meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” Penjelasan “di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen

⁶⁸ *Ibid.*, h.3

akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.⁶⁹

Sedangkan pengertian pelaku konsumen menurut UUPK Pasal 1 Angka 3 “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang hukum” penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain”.⁷⁰

Saat ini konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tingkat yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.⁷¹

⁶⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.8

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai, maka dari itu pemerintah membentuk badan dan lembaga perlindungan konsumen.⁷²

1). Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini terdiri atas 15 orang sampai dengan 25 orang anggota yang mewakili unsure: (1) pemerintah, (2) pelaku usaha, (3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, (4) akademisi, dan (5) tenaga ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁷³

BPKN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota

⁷² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.118

⁷³ *Ibid.*,

provinsi. Fungsi BPKN ini hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK):⁷⁴

- (1). Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- (2). Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- (3). Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- (4). Mendoring berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- (5). Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikahan kepada konsumen;
- (6). Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- (7). Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan

⁷⁴*Ibid.*,

merupakan perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi:⁷⁵

- (1). Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2). Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- (3). Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- (4). Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- (5). Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyatakan bahwa LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di samping itu,

⁷⁵ Zulham, *Op.cit.*, h.140

LPKSM juga dibebani kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kabupaten/kota setiap tahun.⁷⁶

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen melalui LPKSM ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁷⁷

3). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Hubungan hukum antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatandi pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.⁷⁸

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Badan ini dibentuk di setiap daerah Tingkat II (Pasal 49) BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, h.127

(Pasal 49 ayat (1), dan Badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsure pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsure tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan Badan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat (Pasal 50 jo. 51). Tugas dan wewenang BPSK (Pasal 52) meliputi:⁷⁹

- (1). Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- (2). Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- (3). Pengawasan klausul baku;
- (4). Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini;
- (5). Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tulisan, tentang dilanggarnya perlindungan konsumen;
- (6). Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen;
- (7). Memanggil pelaku usaha pelanggar;
- (8). Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu;
- (9). Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut (pelaku usaha pelanggar) apabila tidak mau memenuhi panggilan;

⁷⁹*Ibid.*,

- (10). Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- (11). Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen;
- (12). Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang
- (13). Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.⁸⁰

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penetapan Harga

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini ditangkap dalam peran Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah.⁸¹

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistic atau yang lainnya.⁸²

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya.

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h.182

⁸² Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014), h.19

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.⁸³

Secara umum, *jumhur* ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat mazhab terkenal, yaitu Hambali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: *pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw akan melaksanakannya; *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang.⁸⁴

2. Prinsip Ar-Ridha

Ridha secara bahasa menerima dengan suka hati, secara istilah diartikan sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan diiringi sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas dan penuh ketaatan, serta menjauhi dari perbuatan buruk (maksiyat), baik lahir ataupun batin.

Prinsip *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Begitu pula halnya dengan penentuan harga haruslah dibangun dengan prinsip *Ar-Ridha* dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

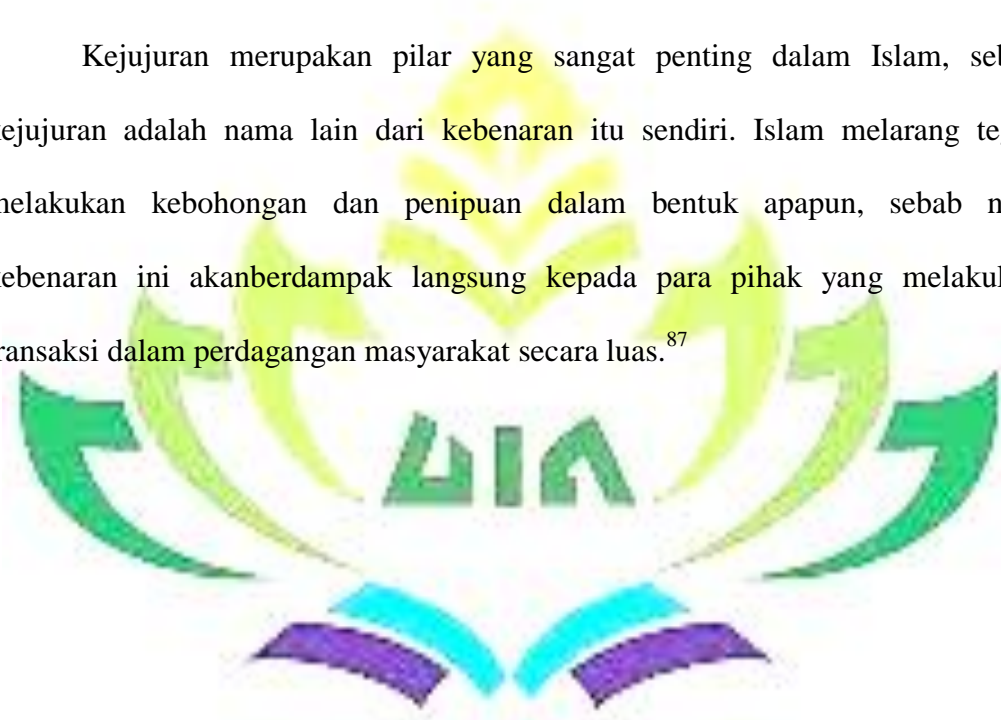
⁸⁵ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 203-210.

3. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ketiga dalam penetapan harga adalah prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam ketetapan harga yang ada saat transaksi.⁸⁶

4. Prinsip Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.⁸⁷



⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷*Ibid.*,

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Latar Belakang Permen No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, perlu melakukan perubahan terhadap harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen;
- b. Nahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI
PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI
KONSUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Harga Acuan Pembelian Di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
2. Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkatkonsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.

Pasal 2

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung dan kedelai mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

1. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan/atau Badan Usaha Milik Negara lainnya dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Dalam melakukan pembelian dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta.

Pasal 4

Pelaku usaha dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

1. Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Petani dan harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Petani dan melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

2. Penugasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan setelah Menteri berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Komoditas beras, jagung, dan kedelai diberikan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); dan
 - b. Komoditas gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan/atau Badan Usaha Milik Negara lainnya.

Pasal 7

Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 8

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang baru belum diterapkan maka Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 482); dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1405),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2017 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana.

B. Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Penetapan Harga yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Permen Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani	Harga Acuan Penjualan di Konsumen
1.	Beras: Gabah Kering Panen Gabah Kering Giling Beras	Rp. 3.700/kg Rp. 4.600/kg Rp. 7.300/kg	Rp. 9.500/kg
2.	Jagung: Kadar Air 15% Kadar Air 20% Kadar Air 25% Kadar Air 30% Kadar Air 35%	Rp. 3.150/kg Rp. 3.050/kg Rp. 2.850/kg Rp. 2.750/kg Rp. 2.500/kg	Rp. 4.000/kg* - - - -
3.	Kedelai: Lokal Impor	Rp. 8.500/kg Rp. 6.550/kg	Rp. 9.200/kg** Rp. 6.800/kg**
4.	Gula: Harga Dasar	Rp. 9.100/kg	Rp. 12.500/kg
5.	Minyak Goreng: Curah Kemasan Sederhana	- -	Rp. 10.500/L Rp. 11.000/L
6.	Bawang Merah: Konde Basah Konde Askip Rogol Askip	Rp. 15.000/kg Rp. 18.300/kg Rp. 22.500/kg	- - Rp. 32.000/kg
7.	a. Daging Beku b. Daging Sapi segar / <i>Chilled</i> : 1). Paha Depan 2). Paha Belakang 3). Sandung Lamur 4). Tetelan	- - - - - - -	Rp. 80.000/kg Rp. 98.000/kg Rp. 105.000/kg Rp. 80.000/kg Rp. 50.000/kg
8.	Daging Ayam Ras	Rp. 18.000/kg***	Rp. 32.000/kg
9.	Telur Ayam Ras	Rp. 18.000/kg***	Rp. 22.000/kg

Keterangan:

- *) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak)
- **) Harga Penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/ tempe, pakan)
- ***) Harga pembelian di peternak

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Laba usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga per unit dikalikan kuantitas yang terjual. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Laba} &= \text{pendapatan} - \text{Biaya Total} \\ &= (\text{Harga per unit} \times \text{Kuantitas yang terjual}) - \text{Biaya Total} \end{aligned}$$

Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan. Sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha.⁸⁸

Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (*value*) dapat didefinisikan

⁸⁸H.M. Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2007), h. 89

sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Manfaat Yang Dirasakan}}{\text{Harga}}$$

Dari rumus di atas dapat dipahami bahwa jika manfaat yang dirasakan oleh konsumen meningkat pada harga tertentu, maka nilainya akan mengikat pula. Demikian pula sebaliknya, nilai suatu barang atau jasa akan meningkat pada harga tertentu seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan.⁸⁹

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana

⁸⁹*Ibid.*, h. 90

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁹⁰

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur *dzulm* akan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.⁹¹

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, *Al-Muqodimah*, terutama dalam bab “Harga-harga di kota-kota” (*Price in Town*). Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014), h.26

menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini, disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.⁹²

Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih perinci ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

Dalam buku tersebut, Ibn Khaldun mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, *“When goods (brought from outside) are few and rare, their price go up. On the other hand, when the country is near and the road is safe for travelling, there will be many to transport the goods. Thus they will be found in large quantities, and the price will go down.”*⁹³ Yang artinya “Ketika barang-barang (yang dibawa dari luar) berjumlah sedikit dan jarang (langka), harganya naik. Di sisi lain, saat suatu Negara jaraknya dekat dan jalannya aman untuk bepergian, akan ada banyak yang melakukan pengangkutan barang. Dengan demikian, barang-barang akan ditemukan dalam jumlah yang besar (banyak), dan harganya turun”.

⁹² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.274

⁹³ *Ibid.*, h.275

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibn Taimiyah. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor yang memengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.⁹⁴

Dalam kondisi tertentu, Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup

⁹⁴ *Ibid.*,

masyarakat. *Kedua*. Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu penetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kuota kebutuhan dasarnya. *Ketiga*. Terjadinya *hasratau* pemberontakan sehingga distribusi barang untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. *Keempat*. Terjadinya kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.⁹⁵

Konsep ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (*competitive market price*) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, terkadang harga yang seimbang tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harga tersebut terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan harga tersebut tidak wajar. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik.⁹⁶

⁹⁵ Syamsul Hilal, *Op.cit.*,

⁹⁶ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam". *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 (Januari 2012), h.79

Chapra berpendapat terkait dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam dunia perdagangan yang terlihat dalam persaingan pasar dan diikuti regulasi harga memanglah sangat penting. Kendati harapan tersebut ternyata belum memadai. Sebagian besar ulama Islam menekankan perlunya peran nilai-nilai moral bagi semua pelaku bisnis di dalam pasar, guna meraih kebersihan jiwa dan kejujuran. Sebab tidak seluruh individu sadar dengan tugasnya, andai pun sadar dan mengetahui mereka belum semuanya mau melaksanakannya.⁹⁷

Dalam mekanisme pasar, regulasi harga dan moral harus ada dalam satu kesatuan paket pemikiran, sebab apabila hanya terwujudkan nilai moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu peran efektif Negara sebagai mitra, katalisator, dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi Islam.⁹⁸

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain:

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*,

persaingan yang sehat dan adil (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.⁹⁹

Perhatian pada pentingnya peran Negara telah dicerminkan oleh tulisan para ulama terkemuka sepanjang sejarah. Al-Mawardi (dalam Nu'man, 1985) misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan Islam dan Negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana juga dikutip Islahi, kebijakan intervensi harga menurut Ibnu Taimiyah terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Intervensi Harga Yang Zalim dan Tidak Sah

Intervensi harga dipandang sebagai zalim dan tidak sah apabila kebijakan tersebut menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Jika harga ditetapkan di atas harga pasar maka tentu akan merugikan konsumen, sementara jika ditetapkan di bawah harga pasar tentu akan merugikan produsen.

2. Intervensi Harga Yang Adil dan Sah

Intervensi harga dipandang adil jika kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Untuk itu

⁹⁹ M. Nur Riantoni Al Arif, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.263

intervensi harga yang adil justru akan membawa tingkat harga kepada posisi harga pasar yang seharusnya atau harga yang wajar. Dalam posisi ini baik penjual maupun pembeli tidak dirugikan.¹⁰⁰

Intervensi pasar juga tidak selalu diartikan hanya mempengaruhi permintaan dan penawaran saja, tetapi hal-hal yang dapat memperlancar penawaran dan permintaan. Ibnu Khaldun telah berkata: “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit maka harga-harga akan naik. Tetapi, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun”. Terganggunya transportasi akan menghambat pasokan barang dan jasa di pasar sehingga mengurangi penawaran. Pemerintah harus memperbaiki hambatan transportasi ini agar lancar kembali sehingga penawaran barang di pasar akan normal kembali.¹⁰¹

Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya Negara yang memainkan peranan, dan Negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintah yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah. Demikian pula Baqir al-Sadr mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Secara lebih rinci, Mannan menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga, yaitu:

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan (*mutual goodwill*).¹⁰²

Konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga Mannan mengkategorikan pada dua hal, yaitu: (1) jenis penyebab perubahan harga tersebut, dan (2) urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu keadaan darurat. Secara garis besar penyebab perubahan harga dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Genuine factors*, yaitu faktor-faktor yang bersifat alamiah. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga dengan intervensi pasar (*market intervention*) dengan mempengaruhi posisi permintaan dan atau penawaran sehingga tercipta harga yang lebih pas.
2. *Non genuine factor*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan menghilangkan penyebab distorsi tersebut sehingga mekanisme pasar yang bebas dapat bekerja

¹⁰²*Ibid.*,

kembali, termasuk dengan cara penetapan harga (*price intervention*).¹⁰³

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hadits yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Penolakan Rasulullah terhadap penetapan harga (*tas'ir*) berdasarkan hadits ini adalah karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya karena kenaikan harga yang terjadi masih dalam keadaan normal bukan akibat distorsi pasar. Ketika harga terbentuk karena *supply* dan *demand* yang apabila dilakukan intervensi akan menimbulkan kezaliman bagi banyak pihak.¹⁰⁴

C. Kelebihan dan Kelemahan dari Permen Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017

Kelebihan dari Peraturan Menteri Perdagangan No 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen ini ialah akan mengurangi bahkan menghilangkan pedagang-pedagang nakal yang mencoba bermain curang dalam berdagang. Para pedagang tersebut tidak bisa lagi melambungkan harga sesuka hati mereka, karena sudah ada penetapan harga yang dilakukan

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam". *Jurnal Fitrah*, Vol. 01 No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 81

pemerintah. Mengurangi adanya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan maksud untuk dijual kembali jika terjadi kelangkaan dari bahan pokok tersebut, dan menjual dengan harga yang sangat tinggi demi meraup keuntungan yang besar. Karena Pemerintah sendiri telah bekerjasama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menyediakan bahan pokok.

Kelebihan lainnya dari Peraturan Menteri Perdagangan No 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen ini ialah memudahkan para konsumen untuk mengetahui harga-harga barang pokok yang ada dipasaran, karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah dicantumkan harga-harga barang pokok itu sendiri. Konsumen mengetahui harga bahan pokok itu dari tingkat petaninya dan mengetahui harga bahan pokok itu ketika dijual ke konsumen, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi akan adanya pedagang nakal yang sering menaikkan harga sesuka hati mereka tanpa adanya sebab dan alasan dari kenaikan harga tersebut

Kelemahan dari Peraturan Menteri Perdagangan No 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, tidak adanya keadilan bagi petani, dimana petani tidak bisa menaikkan harga yang lebih tinggi dan tidak bisa mendapat keuntungan yang lebih dari hasil pertanian mereka itu sendiri. karena harga jual mereka telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bisa lebih dari apa yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 5 Ayat 1, “Dalam hal harga di

tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Petani dan harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Petani dan melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Dilihat dari isi Pasal 5 tersebut, bahwa dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di konsumen. Berarti untuk pembelian di tingkat petani harganya dibawah harga yang telah ditetapkan, dari sinilah kita bisa melihat bahwa tidak adanya kesempatan bagi petani untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi lagi dari hasil pertaniannya.

Kelemahan lainnya ialah tidak adanya persaingan sempurna dalam pasar, dan tidak ada lagi harga yang terbentuk dari mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Karena semua harga yang ada di pasar terbentuk dari penetapan harga yang telah di atur oleh pemerintah. Meskipun harga-harga yang telah di tetapkan pemerintah itu sendiri terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena masih saja ada pedagang yang menaikkan harga ketika saat-saat tertentu, misalnya menjelang hari raya dan hari-hari besar lainnya.

BAB IV

ANALISIS DATA

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017. Yaitu berisikan suatu peraturan dengan maksud dan tujuan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras. Pemerintah telah menetapkan harga acuan untuk pembelian di petani serta menetapkan harga acuan penjualan di konsumen sesuai dengan masing-masing komoditinya.

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi seorang konsumen ketika mengalami kesulitan dalam menilai mutu suatu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen itu sendiri. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, tentunya harga barang tersebut mahal. Dan sebaliknya apabila yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut pastinya tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berkepanjangan. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dalam berbisnis dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu tindakan yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli atau masyarakat bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Reaksi penolakan tersebut bisa diekspresikan dengan berbagai tindakan yang kadang kala anarkis bahkan bisa saja melanggar hukum.

Harga merupakan hal yang penting perekonomian, karena harga sangatlah berperan dalam bisnis dan usaha yang sedang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi suatu usaha. Maka dari itu harga sangat berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga harga berpengaruh terhadap suatu laba usaha. Karena persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Namun para konsumen tentu memiliki batas harga yang dimana harga yang lebih rendah menandakan produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana harga yang lebih tinggi

dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

Kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga atau disebut juga *at-tas'ir al-jabari* adalah suatu bentuk intervensi pemerintah dalam menetapkan harga-harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri di atas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, dalam Pasal 6 yang terdiri dari 3 ayat. Ayat (1) : Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga Acuan Pembelian di Petani dan harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Petani dan melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Ayat (2) : Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Menteri

berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ayat (3) : Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ; a. komoditi beras, jagung, dan kedelai diberikan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); dan b. komoditi gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan / atau Badan Usaha Milik Negara lainnya.

Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3 tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk melakukan pembelian bahan-bahan pokok di petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan menjual kembali ke konsumen dengan harga yang telah ditetapkan. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan stabilitas dan kepastian harga bahan-bahan pokok yang ada di pasar.

Penetapan harga oleh Pemerintah sebenarnya ialah untuk menjamin kesejahteraan para produsen dan konsumen, di mana dalam penetapan harga tersebut pemerintah telah menetapkan harga pembelian di tingkat petani dengan mempertimbangkan harga yang wajar dan telah memperhitungkan semua biaya-biaya produksi, serta keuntungan bagi produsen (petani).Serta telah menetapkan harga penjualan di konsumen sesuai dengan komoditinya.Namun dari aspek kemanfaatannya kebijakan pemerintah dalam penetapan harga hanya menguntungkan salah satu pihak

saja yaitu konsumen. Sedangkan pihak produsen dalam hal ini adalah petani tidaklah mendapat manfaat dari adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Produsen (petani) di batasi haknya dalam menjual hasil panennya, petani tidak bisa mengambil keuntungan yang lebih karena harga yang diberikan ke konsumen telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Islam campur tangan pemerintah dalam hal harga pasar sebenarnya tidak dibenarkan, sebab harga itu akan terbentuk dengan sendirinya tergantung dari keadaan pasar itu sendiri. dengan adanya permintaan dan penawaran dalam pasar maka harga yang adil pun akan terbentuk. Pemerintah mempunyai batasan tertentu untuk melakukan intervensi dalam masalah ekonomi. Islam memberikan pembelaan yang kuat terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan.

Pemerintah dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala sesuatu yang menyangkut keadilan hak dan kewajiban para penjual dan pembeli. Seperti komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat, dan terbukti para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka. Jika masyarakat atau pedagang telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari'ah dalam perilaku dagang dan

bisnis mereka, maka tidak ada alasan apapun bagi Negara atau pemerintah untuk melakukan intervensi.

Pemerintah boleh dan harus melakukan intervensi, jika di suatu pasar telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah. Dan dalam melakukan intervensi harga pemerintah juga harus menetapkan harga yang adil, pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi. Penetapan harga tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang (petani).

Pemerintah dalam menetapkan harga haruslah menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam;

1. Prinsip keadilan, dalam menetapkan harga pemerintah harus memperhatikan keadilan dari kedua belah pihak, yaitu produsen (petani) dan konsumen. Prinsip keadilan ini sangatlah penting dalam penetapan harga, sebab dengan adanya keadilan dalam penetapan harga tersebut maka tidak akan ada pihak yang terzalimi, karena Islam mengharamkan kezhaliman. Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Penjualan di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen ini, Pemerintah cenderung hanya memetingkan pihak konsumen saja. Dalam penetapan harga ini yang diuntungkan hanyalah pihak konsumen, sedangkan pihak produsen (petani) dibatasi haknya untuk menjual barangnya ke konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Prinsip Ar-Ridha, yakni prinsip kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam transaksi jual beli harga itu terbentuk atas kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam hal ini disebut sebagai petani dan konsumen. Jika harga suatu barang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan ada sifat paksaan di dalamnya, penjual (petani) telah ditetapkan harga penjualannya kepada konsumen maka akan ada sifat terpaksa dari pihak petani tersebut dalam menjual barangnya kepada konsumen. Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang yang akan dijual berarti kerelaan hati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang merupakan unsur sangat penting sekali dalam jual beli telah hilang.
3. Prinsip Keterbukaan, Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat transaksi. Dalam prinsip ini penetapan harga dilakukan oleh penjual itu sendiri bukan pemerintah, dalam menetapkan harga penjual harus terbuka sebab dan alasannya terbentuknya harga tersebut.
4. Prinsip Kejujuran, Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas. Dalam transaksi jual beli

penjual harus jujur kepada pembeli dan jangan ada kebohongan serta kecurangan di dalamnya. Jika ditemukan adanya kecurang dalam transaksi jual beli tersebut maka di sinilah campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam menetapkan harga. Jika tidak adanya kecurangan atau kebohongan dalam transaksi tersebut maka tidak di benarkan adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”. Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Penetapan harga yang adil dan sah ialah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemaslahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran". Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar. Namun bila tidak ditemukan adanya monopoli, kecurangan serta kedzaliman dalam pasar tersebut maka penetapan harga oleh pemerintah tidak dibenarkan. Karena penetapan harga berarti memaksa dan menekan para pedagang untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Maka dari itu penetapan harga itu dilarang karena bersifat dzalim.

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu

hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

Islam tidak pernah member batasan tentang penetapan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadits Rasulullah SAW yang enggak untuk menetapkan harga. Sementara itu, apabila terjadi penetapan harga maka secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual/petani) untuk menjual barang dagangannya tersebut.

Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tentram di bawah naungan Allah. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi yang dilandaskan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, atau pertanian, industry dan jasa, harus berpedoman pada asas peraturan Al-Qur'an dan hadits. Demikian pula halnya dengan aspek yang

berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh penelitian dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen” (Studi Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017), maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

Pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga melambung tinggi, para sahabat lalu berkata pada Rasul, “Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami”. Rasulullah SAW menjawab “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan member rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezhaliman dalam darah maupun harta”.

Pada saat itu Nabi SAW enggan untuk menetapkan harga dan tidak mau campur tangan dalam masalah penetapan harga-harga barang. Hal tersebut disebabkan karena, kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok

masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga meskipun sahabat-sahabat memintanya.

Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah dan tidak mau untuk menetapkan harga meskipun saat itu harga-harga sedang melambung tinggi, karena melambung tingginya harga tersebut karena factor alam bukan karena kecurangan dari para pedagang pasar. Sebab penetapan harga merupakan suatu kezhaliman. Karena dalam jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, penjual mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Pemerintah boleh saja ikut campur dalam penetapan harga jika dalam suatu pasar ditemui adanya kemudharatan dan kezhaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, seperti penimbunan barang sehingga terjadinya kelangkaan bahan-bahan pokok dan mengakibatkan harga-harga melambung tinggi. Jika tidak ada kecurangan serta kezhaliman dalam suatu pasar maka pemerintah tidak ada hak untuk melakukan intervensi terhadap harga.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka Penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kepada Menteri Perdagangan, sebaiknya dalam menetapkan suatu peraturan dalam hal ini adalah harga, selain menggunakan hukum positif juga harus melihat dari sisi hukum Islamnya. Di mana dalam hukum Islam pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam menetapkan suatu harga dalam suatu komoditi khususnya bahan-bahan pokok, jika tidak ada kecurangan serta kezhaliman di dalamnya.

Kepada Pemerintah untuk kedepannya diharapkan dalam menetapkan suatu peraturan tidak hanya menggunakan hukum positif saja, diharapkan hukum Islam juga dapat digunakan dalam menetapkan suatu peraturan. Agar hukum positif dan hukum Islam dapat seimbang dan diterapkan di Indonesia agar terwujudnya korelasi diantara keduanya.

Kepada masyarakat dan kepada para pembaca, khususnya para pedagang di pasar ataupun di mana saja diharapkan dapat selalu mengedepankan nilai-nilai agama dan etika saat melakukan suatu bisnis dan jual beli. Jangan hanya mengedepankan keuntungan semata melainkan mengedepankan manfaat yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto, 2014, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddindan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Asqalani, Ibnu Hajar, 2011, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6, Jakarta: Pustaka as-Sunnah
- Basri, Ikhwan Abidin, 2004, *Ekonomi Islam*, Cet-1, Jakarta: Zikrul Hasan.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Press
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro.
- Hadi, Sutrisno, 1977, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga.
- Hanafi, Ahmad, 1995, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, Isnaini, dkk, 2015, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghaliha IKAP.
- Islahi, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Karim, Adiwarman Azwar, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kautur, Ranny, 2000, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung: Tharuna Grafika
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, 2012, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta.

Pusat Pengkajiandan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf, 2006, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif

Soekanto, Soejon dan Mahmudji, Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Wali Press

Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sungadji, Etta Mamang dan Sopiah, 2007, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Susiadi AS, 2015, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Group.

JURNAL:

Eva Willya, 2013, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari”.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 11 No. 2.

H.M. Birusman Nuryadin, Juni 2007, “Harga Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Mazahib*, Vol. 4 No. 1

M. Arif Hakim, Maret 2015, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1.

Mabarroh Azizah, Januari 2012, “Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76.

Qushoniah, Oktober 2014, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”. *Jurnal Syaria*, Vol. 2 No. 2.

Syamsul Hilal, Juli 2014, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2.

Yenti Afrida, 2015, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam”. *Jurnal Fitrah*, Vol. 01 No. 1.

